ARUMBAE: JURNAL ILMIAH TEOLOGI DAN STUDI AGAMA
Available online at: http://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae
E-ISSN: 2715-775X
Vol. 6, No. 1 (Juni, 2024): 132-152
DOI: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

Imajinasi Nasionalisme dalam Perspektif Teoritik Kebangsaan dan Agama

George Marthen Likumahwa,[1*] Mus J. Huliselan,[2] John A. Titaley,[3] Simon Pieter Soegijono[4]
[1,2,3,4] *Program Studi Doktor Agama dan Kebangsaan, UKIM,*
**Corresponding Author*

Email: georgelikumahwa@gmail.com

Submitted: 07-06-2024 Accepted: 30-06-2024 Published: 30-06-2024

Abstract

This study presents a theoretical analysis of the imagination of nationalism which can become an epistemic anchor when discussing the idea of nationalism and its relevance for contemporary society. With a qualitative descriptive approach, the imagination of nationalism is analyzed as a theoretical perspective on nationalism which is very important when faced with various problems in global society today. These issues include the struggle for justice, freedom, human rights, and most recently the development of digitalization which can undermine the life of a nation. This theoretical idea of nationalistic imagination was built in discussing a social problem of indigenous peoples who were displaced by waves of capitalism that used state power to encroach on the living existence space of a group of indigenous peoples. This research, in the end, presents various theoretical perspectives regarding the imagination of nationalism which can enliven the discourse on various nationalist issues today.

Keywords: Nationalism imagination, Theoretical Perspective; Nationalism and Religion; Nationalisms issue.

Abstrak

Kajian ini membentangkan analisis teoritik mengenai imajinasi nasionalisme yang dapat menjadi sebuah jangkar epistemik ketika mendiskursuskan gagasan nasionalisme dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat di masa kini. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, imajinasi nasionalisme dianalisis sebagai sebuah perspektif teoritik kebangsaan yang sangat penting ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan masyarakat global di masa kini. Persoalan-persoalan itu, seperti perjuangan keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, dan yang paling mutakhir adalah perkembangan digitalisasi yang dapat merorong kehidupan bersama suatu bangsa. Gagasan teoritik imajinasi nasionalisme ini sesungguhnya dibangun dalam mendiskursuskan sebuah persoalan sosial masyarakat adat yang tergusur oleh gelombang kapitalisme yang menggunakan kekuasaan negara untuk menyeroboti ruang eksistensi hidup suatu kelompok masyarakat adat. Penelitian ini, pada akhirnya, menyuguhkan berbagai perspektif teoritis mengenai imajinasi nasionalisme yang dapat menyemarakkan diskursus berbagai isu kebangsaan di masa kini.

Kata-kata Kunci: Imajinasi Nasionalisme; perpektif teoritik, nasionalisme dan agama. Isu-isu kebangsaan.

@ Copyright: Authors 2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

PENDAHULUAN

Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah mendeklarasikan sebagai Negara yang merdeka. Kemerdekaan ini telah diakui secara *de jure* dan *de facto* oleh negara tetangga bahkan dunia. Makna dari kemerdekaan ini sesungguhnya bahwa Indonesia bebas dari penjajahan bahkan bebas dari intervensi negara lain. "masyarakat yang adil dan makmur" adalah suatu cita-cita kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita tersebut sekaligus menjadi spirit nasionalisme Keindonesiaan. Nasionalisme diartikan sebagai paham yang mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia untuk bersama-sama melawan kolonialisme. Kesamaan tujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka inilah yang kemudian mendasari pergerakan rakyat saat itu untuk melawan penjajahan. Makna heroik ini yang kemudian dipakai untuk membangun rasa kebersamaan yang bersifat lintas etnis dan melampaui ikatan-ikatan primordial.

Bahkan setelah Indonesia merdeka, pemahaman tentang nasionalisme selalu dikaitkan dengan entitas kenasionalan, yang merupakan penggabungan dari ragam identitas lokal atas nama persatuan dan kesatuan. Nasionalisme untuk kepentingan melawan penjajahan, dibentuk sebagai instrumen pemersatu bangsa. Sentimen nasionalisme, karena itu, senantiasa dihasilkan dari mobilisasi perasaan atau imajinasi masyarakat sebagai entitas yang berbeda dengan entitas lain yang dibentuk sebagai musuh bersama yang harus dilawan. Rasa persatuan dibentuk dengan dasar argumen kesamaan latar belakang historis dan kebersamaan dalam menjalani perjalanan historis tersebut. Seperti halnya dalam perjuangan melawan penjajah, nasionalisme dilekatkan dengan jargon senasib sepenanggungan, demikian pula setelah kemerdekaan, nasionalisme adalah persatuan dan kesatuan.[1]

Nasionalisme bukanlah sesuatu yang alamiah dan statis, melainkan dibentuk dan dinamis. Dalam perjalanan sejarah, nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai yang dibentuk untuk melawan dominasi kolonialisme oleh sekelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki identitas masing-masing yang terpisah. Sebagai sebuah identitas kebangsaan, Indonesia baru terbentuk pada awal abad ke-20, ketika ada kesepakatan untuk mendeklarasikan identitas baru yang melampaui identitas berbasis etnis yang sebelumnya digunakan. Identitas sebagai bangsa Indonesia ini kemudian mencapai puncaknya ketika

[1] Paskarina, C. (2016). "Wacana Negara Maritim dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia," dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1. No. 1 (2016), 1-8.

Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka.

George Kahin menggunakan beragam perspektif untuk menjelaskan bangkitnya nasionalisme Indonesia, antara lain ekonomi politik runtuhnya (kekuasaan) kolonial; perubahan-perubahan sosio-psikologis dan distorsi hubungan sosial yang ditimbulkan oleh kolonialisme; tumbuhnya kesadaran politik nasional akibat kebijakan pendidikan kolonial Belanda yang ditujukan kepada golongan penduduk pribumi tertentu Hindia Belanda.[2] Akan tetapi, dalam mencari asal usul nasionalisme Indonesia, Kahin juga mengajukan adanya faktor lain dari timbulnya nasionalisme tersebut, yakni batas-batas teritorial Hindia Timur Belanda yang secara kasar bersesuaian dengan teritori dua kerajaan besar 'Indonesia' dari abad ke-9 dan ke-15, yakni Sriwijaya dan Majapahit.[3]

Asumsi Kahin tersebut memberikan nilai penting pada aspek ruang dalam perkembangan kesadaran nasional Indonesia. Sriwijaya dan Majapahit muncul sebagai hasil penaklukan oleh para penduduk Jawa, sementara Hindia Belanda muncul sebagai hasil penaklukan Jawa dan bagian-bagian 'Indonesia' lainnya oleh Belanda.[4] Perbedaan ini menunjukkan bahwa penentu identitas kebangsaan bukanlah pengaturan persoalan sosial, melainkan ruang atau wilayah yang menjadi batas-batas Hindia Belanda, Sriwijaya, dan Majapahit. Deskripsi tentang Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang kemudian seringkali dipakai untuk membangun kebanggaan sebagai pewaris dari kejayaan kerajaan-kerajaan tersebut lebih merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki hubungan yang linier dan kontinyu dengan masyarakat-masyarakat sebelumnya dan 'bangsa Indonesia' adalah identitas yang inheren dalam sejarah, yang dibawa ke permukaan oleh kemunculan sebuah negara baru.[5]

Identitas merupakan sumber pengalaman dan pemaknaan seseorang. Melalui identitas inilah, setiap aktor memaknai atribut-atribut sosialnya. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Piliang, bahwa identitas memberikan rasa 'aman' melalui keanggotaan dengan sekelompok orang yang dianggap sama atau dengan kata lain identitas menjamin keberadaan diri dengan meminjam kekuatan kolektif.[6] Identitas keindonesiaan adalah bagian dari identitas yang kompleks. Mengutip tesis yang dibuat oleh Sutan Tadir

[2] Kahin, George. Mc.T. *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1952), 16.
[3] Philpott, Simon. 2003. *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Terj. Nuruddin Mhd. Ali, Uzair Fauzan (Yogyakarta: LkiS, 2003), 30.
[4] Ibid, 34.
[5] Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, 18.
[6] Pilliang, Y. A. "Jika Rakyat Kritis, Ia Sudah Na-sionalis," dalam *Gerbang,* Vol. 11. IV (2005), 8.

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

Alisjah-bana, keindonesiaan bukanlah sebuah warisan sejarah yang *taken for granted* dan statis melainkan sebuah identitas yang dibangun secara sadar. Dalam pembentukan identitas secara sadar inilah keindonesiaan seseorang juga dipengaruhi oleh konteks yang lebih besar. Di Indonesia, bangunan identitas keindonesiaan tidak pernah dapat dilepaskan dari doktrin kebangsaan melalui berbagai macam simbol keindonesiaan.

Menurut Nuri Soeseno terdapat dua jenis nasionalisme berdasarkan identifikasi diri pada sub bangsa dan negara bangsa, yaitu *civic* dan *ethnic*. Nasionalisme atau rasa kebangsaan ini dibedakan menurut level kebangsaan: nasionalisme etnis (*ethnic nationalism*), yaitu nasionalisme yang merupakan ikatan kebangsaan yang dibangun berdasarkan persamaan bahasa, kebudayaan, dan darah keturunan kelompok etnis tertentu.[7] Sedangkan nasionalisme kewarganegaraan (*civic nationalism*), merupakan kebangsaan yang dibangun lewat adanya pengakuan dan kesetiaan pada otoritas konstitusional dan kerangka perpolitikan dalam sebuah negara, selain sejarah yang sama sebagai negara bangsa dan digunakannya bahasa yang sama oleh semua kelompok bangsa-bangsa. Sederhananya, ikatan yang dibangun nasionalisme ini didasarkan atas kewarganengaraan di dalam sebuah wilayah teritorial dan batas-batas yang berlaku bagi negara-bangsa. Keduanya sebagai dua kutub yang dinamis, dapat dikembangkan berdasarkan kepentingan pengikutnya. *Civic*, bersifat positif sebagai nasionalisme yang sudah melebur dalam sebuah state berupa Negara. Dalam *civic*, nilai nasionalisme telah mengkristal dan cenderung dianggap selesai tanpa masalah apapun. Sedangkan pada *ethnic*, nasionalisme belum selesai dan terus berusaha menemukan titik akhir pembentukannya. Namun hal ini bukan berarti bahwa *ethnic* tidak dapat menuju ke *civic,* karena ada nilai yang mungkin tidak diterima oleh kaum *ethnic*. Dalam *ethnic*, rasa saling kepercayaan dan rasa memiliki didasarkan pada ikatan etnis.[8]

Beragam perspektif teoritik yang telah diuraikan sebelumnya sebagai latar belakang konteks penelitian ini menegaskan makna nasionalisme Indonesia sebagai *locus* dan fokus kajian artikel ini. Dalam pembahasan selanjutnya, kajian ini membentangkan analisis teoritik mengenai imajinasi nasionalisme yang dapat menjadi sebuah jangkar epistemik ketika mendiskursuskan gagasan nasionalisme dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat di masa kini. Imajinasi nasionalisme merupakan sebuah perspektif teoritik

[7] Nuri Suseno, Kewarganegaraan: *Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer* (Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2010), 18.

[8]Ibid, 19.

kebangsaan yang sangat penting ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan masyarakat global di masa kini. Persoalan-persoalan itu, seperti perjuangan keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, dan yang paling mutakhir adalah perkembangan digitalisasi yang dapat merorong kehidupan bersama suatu bangsa. Gagasan teoritik imajinasi nasionalisme ini sesungguhnya dibangun dalam mendiskursuskan sebuah persoalan sosial masyarakat adat yang tergusur oleh gelombang kapitalisme yang menggunakan kekuasaan negara untuk menyeroboti ruang eksistensi hidup suatu kelompok masyarakat adat, komunitas Maneo di Pulau Seram, Provinsi Maluku.[9] Para penulis secara konsisten telah melakukan penelitian mengenai berbagai persoalan kemiskinan, penderitaan, dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat di Pulau Seram.[10] Penyuguhan berbagai perspektif teoritis mengenai imajinasi nasionalisme diharapkan dapat menyemarakkan diskursus berbagai isu kebangsaan di masa kini.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lexy J. Moleong menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami dan mendeskripsikan fenomena secara alamiah yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, tindakan, persepsi, motivasi dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[11] Dalam kajian ini, secara kualitatif, gagasan teoritik mengenai imajinasi nasionalisme dideskripsikan untuk membangun persepsi epistemologis mengenai nasionalisme di dalam konteks masa kini. Konsep majinasi nasionalisme dibahas mulai dari imajinasi sosial, imajinasi nasionalisme dalam bayang kapitalisme dan reformasi gereja, nasionalisme resmi dalam latar pengaruh kolonialisme, hingga gelombang terakhir nasionalisme di dalam kemerdekaan Indonesia. Alur teoritik imajinasionalisme dalam artikel ini dimuarakan pada kelindan agama dan kebangsaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Nasionalisme dalam Imajinasi Sosial

Benedict Anderson menjelaskan nasionalisme merujuk pada satu komunitas politik

[9] George Marthen Likumahwa, "Imajinasi Nasionalisme dari Masyarakat Maneo di Kaki Gunung Murkele, Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah." Disertasi. Ambon: Pascasarjana UKIM, 2024.

[10] George Marthen Likumahwa, John A Titaley, and Steve Gaspersz, "KELUAR DARI KEMISKINAN: STUDI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN JEMAAT DI DUSUN SIAHARI, KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 2, no. 1 (2020).

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

yang terbayangkan, yang secara inheren memiliki keterbatasan tetapi berdaulat dan memiliki legitimasi emosional. Sebab, meski pun sesama warga dari sebuah bangsa tidak saling mengenal, mereka memiliki tali ikatan persaudaraan dan persamaan (the image of communion). Ikatan persaudaraan horisontal menjadi satu dasar bagi anggota sebuah bangsa mengikatkan diri di dalam entitas satu bangsa.[12] Anderson menyebutkan bahwa budaya, agama, bahasa dan sejarah dinasti bisa menjadi dasar pembentukan bangsa atau masyarakat terbayang (the imagined community). Kolonialisme yang datang dengan budaya, bahasa dan agama berbeda dengan gampang dapat menyakinkan bangsa yang dijajah untuk menjadi satu entitas yang berbeda karena mereka memiliki akar budaya, kepercayaan, bahasa yang berbeda dari sosok penjajah mereka.[13] Namun, berkaitan dengan faktor kesamaan ini, Laclau mensyaratkan satu elemen 'positif ' semacam ini harus selalu disertai dengan identitas jenis apa yang mereka tolak jika tidak maka kita akan menjalani resiko mengesensialkan identitas (essetialising identity). Karena itu, seluruh kesamaan yang dikatakan Anderson harus dipahami bukan sebagai suatu asimilasi yang total. Identitas adalah suatu yang bergerak terus, dinamis, dan akan sangat bergantung konteksnya.

Pandangan Anderson ini sejalan dengan pemikiran Laclau and Mouffe tentang wacana. Sebab jika kemudian konsep nasionalisme ditempatkan sebagai wacana ideologi politik, sebagaimana Laclau and Mouffe katakan, wacana-wacana ini bersifat tidak tetap (atau bergantung kepada kondisi lain yang memeranguhinya) dan merupakan konstruksi kesejarahan, yang selalu rentan terhadap kekuatan-kekuatan politik yang dikeluarkan dari produksi mereka sebagaimana juga efek-efek ketercerabutan dari kejadian-kejadian yang berada di luar kontrol mereka.[14] Dengan begitu, nasionalisme sebagai sebuah wacana bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi akan terus mengalami perkembangan.

Imajinasi sosial sebagai perpaduan suatu komunitas yang mendiami suatu wilayah dan dilatari dengan pengalaman atau sejarah yang sama akan membayangkan dan memahami realitas sosial yang ada di sekitar mereka, serta mengembangkan solusi untuk memperbaiki masalah yang ada dalam komunitas yang disebut masyarakat. Imajinasi sosial mengacu pada kemampuan untuk memahami dan mempertimbangkan implikasi sosial dari

[12] Anderson, BROG. 1991. Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso 6-7.

[13] Anderson, BROG. 1991. Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 9.

[14] Laclau E. 1990. New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 30-36.

berbagai keputusan atau tindakan, serta memahami bagaimana faktor sosial mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Wright Mills menjelaskan tentang pentingnya mengembangkan imajinasi sosial sebagai cara untuk memahami keterkaitan antara hal-hal pribadi dan hal-hal publik, serta bagaimana faktor sosial mempengaruhi individu.[15] Mills menjelaskan bahwa imajinasi sosial memungkinkan individu untuk melihat hubungan antara masalah pribadi dan faktor sosial yang mempengaruhinya, sehingga individu dapat melihat permasalahan pribadi mereka dalam konteks yang lebih luas. Hal ini membantu individu untuk melihat bagaimana struktur sosial dan kekuasaan mempengaruhi kehidupan mereka, serta merumuskan solusi untuk permasalahan yang ada.

Dalam menyusun nasionalisme sebagai sesuatu yang dibayangkan oleh masyarakat, Taylor memberikan dua hal penting tentang imajinasi modern, yaitu: ada perubahan dalam masyarakat dari yang bersifat hirarkhi *"mediated-acces societies"* ke kondisi yang bersifat horizontal *"direct-access societies."*[16] Kondisi masyarakat yang dimediasi di dalam mendapatkan akses kerap terjadi di dalam masyarakat tradisional. Mereka masih memiliki hirarkhi yang amat kuat, untuk mendapatkan "keistimewaan" dalam status sosial, pengaruh, dan dominasi yang terkadang didasarkan pada latar belakang seorang individu.[17] Namun, dalam masyarakat modern, masyarakat sudah mendapatkan akses secara langsung, tidak lagi melihat latarbelakang atau status sosial yang mereka emban. Dalam proses perpindahan masyarakat tersebut, konsep nasionalisme terbangun di dalam suatu imajinasi bersama di antara sesama rakyat. Taylor menyebutkan bahwa ada wilayah publik, dimana masyarakat mendapatkan akses yang tidak perlu lagi dimediasi.[18] Wilayah ini kemudian melahirkan pasar sebagai bagian dari aktifitas ekonomi. Keadaan ini, menurut Taylor sebagai *"the rise of the modern citizenship state."*[19]

Imajinasi Nasionalisme

Menurut Anderson dalam perkembangan teori nasionalisme, era modernitas turut memparkasai suatu objektifitas negara-bangsa. Universalitas formal kebangsaan sebagai

[15] Mills. C. W, The sociological Imagination. (Oxford University Press, 2000), 161
[16] Charles Taylor, Dilemmas and Connections: Selected Essays (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011), 86.
[17] John A Jacobson, An Introduction to Political Science (London: Wadsworth Publishing Company, 1998), 17.
[18] Taylor, Dilemmas and Connections: Selected Essays, 87.
[19] Taylor, Dilemmas and Connections: Selected Essays, 87.

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

suatu konsep sosio-kultural bertransisi ke masyarakat sipil dalam pengertian bahwa, di dunia modern setiap orang bisa atau mesti punya suatu "kebangsaan" tertentu, selayaknya setiap manusia juga punya "jenis kelamin" tertentu, sebagai pembeda atau kekhususan pengejahwantahan konkretnya yang tak terelakan – misalnya, berdasarkan defenisinya, kebangsaan bersifat *sui generis*, inilah yang menimbulkan daya "politis" untuk melakukan kesepakatan bersama membayangakan satu kesatuan nasionalisme.

Bagi Anderson, sebagian penggambaran kesulitan di atas muncul dari kenyataan bahwa orang cenderung secara tidak sadar membayangkan dan menggolongkan nasionalisme sebagai sebuah ideologi. Padahal, akan tampak lebih mudah jika orang memperlakukan nasionalisme itu seolah- olah sebagai "penghuni sebuah ruangan bersama" dengan "kekerabatan" dan "agama," bukannya dengan "liberalism" atau "fasisme." Oleh sebab itu, dengan berangkat dari sudut pandang antropologis, Anderson kemudian mengusulkan defenisi suatu bangsa sebagai berikut:

> Bangsa atau nasion: ia adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.[20]Bangsa adalah sesuatu yang *terbayang* karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak akan pernah mendengar tentang mereka. Namun, toh di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.[21]

Melalui definisi semacam ini, Anderson kemudian membandingkan pernyataan Seton- Watson, ketika menyebutkan bahwa:

> . . . yang bisa saya katakan hanyalah bahwa suatu bangsa mengada tatkala sejumlah orang (jumlah yang cukup besar) dalam suatu masyarakat menganggap diri mereka membentuk sebuah *nation*, atau berperilaku seolah mereka membentuk sebuah bangsa.[22]

---

[20] Manuel Castells dalam *The Power of Identity*, yang mendefenisikan "bangsa" sebagai *"…as cultural communes constructed in people's minds and collective memory by the sharing of history and political projects."* (komunitas budaya yang dikonstruksi dalam pikiran masyarakat dan memori bersama tentang sejarah dan politik). Manuel Castells, *The Power of Identity* (Blackwell Publishing, 2002), 51.

[21] Dalam kaitan ini, mungkin juga menarik untuk membandingkan suatu refleksi sederhana tentang konsep kepemimpinan Soekarno – dengan pendekatan metafisik-spiritual – oleh Argawi Kandito, dalam tulisannya "Memimpikan Indonesia Merdeka!". Menurut Argawi Kandito, kualitas kepemimpinan Soekarno telah tergambar lewat visinya, yaitu: Indonesia yang bebas dari penjajahan. Visi ini telah mengendap jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno seolah telah "membayangkan" seperti apa bangsa yang diidam-idamkannya, yakni bangsa yang berdaulat dan mengatur sendiri kehidupannya. Dan idealisme ini kemudian menguat lewat simbolisasi "merdekaatau mati!". Lih. Argawi Kandito, *Soekarno. The Leadership Secret of* (Depok: Oncor Semesta Ilmu, 2011), 59ff.

[22] Benedict Anderson, *Imagined Communities*. . ., 8, mengutip Hugh Seton-Watson, *Nation and State. An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1977), 5

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas, karena bahkan bangsa-bangsa yang paling besar sekalipun – yang anggotanya mungkin semilyar manusia – memiliki garis-garis perbatasan yang pasti, meskipun juga elastis. Di luar batas-batas itu, ada keberadaan bangsa-bangsa lain. Karena itu, tidak adasatu bangsa pun yang membayangkan dirinya akan meliputi seluruh umat manusia di bumi.

Sementara itu, bahwa bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang "berdaulat" lantaran konsep itu lahir dalam kurun waktu di mana masa Pencerahan dan Revolusi menandai porak porandanya legitimasi ilahi yang melekat pada ranah dinastik yang hierarkis pada masa itu. Banyak bangsa kemudian bermimpi tentang kebebasan, dan simbol terhadap kebebasan iniadalah terciptanya negara-bangsa berdaulat.

Dengan demikian, bangsa akan dibayangkan sebagai sebuah "komunitas." Sebaliknya, tanpa mempedulikan bahwa masih adanya ketidakadilan dan bahkan penghisapan yang mungkin sulit terhapuskan dalam setiap bangsa, sebetulnya bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai sebentuk kesetiakawanan yang dirasa secara mendalam, melalui persahabatan yang horizontal dengan sesama. Bahkan rasa persaudaraan semacam inilah yang menurut Anderson, justru telah memungkinkan begitu banyak orang tidak mungkin untuk melenyapkan nyawa orang lain, termasuk bersedia merenggut nyawa sendiri, hanya demi mempertahankan pembayangan terhadap "yang terbatas" itu.

Kajian tentang imajinasi nasionalisme sudah banyak dilakukan oleh beberapa penulis, yang menekankan tujuannya untuk memelihara harapan akan masa depan manusia.[23] Melalui alat bantu imajinasi, aktor-aktor bermanuver dalam ruang kreatif imajiner yang tercipta dari ragam perspektif, sehingga lahirnya ide-ide yang saling diperdebatkan (*rubbing together*).[24] Tujuannya, sebagai undangan, tantangan dan stimulasi bagi setiap aktor-aktor sosial, untuk turut serta dalam rekonstruksi sistem sosial, redefinisi sosial, dan reafirmasi sosial, sambil membongkar situasi normalisasi, dalam perilaku ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Sebab itu, konsep komunitas terbayang adalah, komunitas yang dikonstruksi secara sosial, dibayangkan oleh orang-orang yang

[23] Paul S.Gray, John B. Williamson, and David A.Karph, *The Research Imagination: An introduction to Qualitative and Quantitavie Methods* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 142-169.

[24]Kelly Besecke, Not Just Individualism: Studyng American Culture and Religion after Habits of the heart *Sociology of Religion* 68, No 2 (2007), 195-200.

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

memandang dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut.[25]

Nilai dan norma ini, yang menjadi landasan bagi sikap dan perilaku. Serangkain nilai dan norma tersebut, bisa muncul melalui cara-cara yang spontan, diwariskan secara sosial dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Francis Fukuyama menyebutkan nilai-nilai yang spontan sebagai informal values, yaitu nilai yang dianut bersama yang memungkinkan orang-orang untuk bekerja bersama, dalam sebuah masyarakat. Struktur sosial ini yang dalam pengertian Geerts diartikan sebagai bentuk tindakan yang diambil dalam membentuk sistem sosial, tujuannya untuk menjaga keamanan yang paling mendasar (*ontological security*) dari masyarakat itu sendiri, agar dapat hidup Bersama dan terbebas dari bayang-bayang kolonialisme.

Edward Said dalam *Orientalisme* mengungkapkan bahwa kolonialisme bersifat destruktif, tetapi cenderung statis dan monoton. Pemindahan kekuasaan simbolik yang bekerja dengan cara yang paling represif dikerjakan dengan saksama. Untuk melacaknya, dapat terlihat dari status dan prestise sosial orang pribumi yang selalu ditempatkan sebagai kelas bawah.[26] Negara yang memerdekakan diri dari kolonialisme-imperialisme untuk terbebas dari penjajahan. Namun, ambivalensi sebagai apa yang oleh Homi K. Bhabha sebut sebagai *hibrid* juga muncul bersamaan dengan kenyataan negara dan manusia yang merdeka. Kolonialisme berakar dari satu sistem, cara pandang melihat dunia yang ambisius, moralis dan maskulin antara dunia barat dan dunia timur. Dunia barat selalu dipandang sebagai superior dan dunia timur dilihat sebagai inverior sebab itu harus diberadabkan. Akar kebudayaan ini memunculkan masyarakat kelas dan struktur tersendiri sambil menafikan satu sistem tradisi. Dengan cara inilah kolonialisme bertahan, yakni membuat masyarakat lokal semakin terpinggirkan.

Kemapanan sistem kolonial ini juga mengubah pola berpikir. Dengan demikian, terjadilah kolonialisasi kognitif, yaitu inlander adalah buruk. Pada titik ini sebuah bangsa yang terkoloni berhadapan dengan dua hal: kemerdekaan dan ketergantungan. Konsep inti Bhabha sehubungan dengan relasi antara penjajah (kolonialis) dan terjajah (inlander) membantu untuk menunjukan bahwa identitas penjajah dan terjajah itu adalah identitas yang cair, dinamis Dimana yang disebut penjajah dan terjajah adalah kenyataan yang

[25]Anderson Benedict, R.O'G, *Imagined Communites reflection on the origin and spread of Nasionalism*

[26] Sarjono, Agus R. (2008). *Pendidikan dan Modernitas Barat Dalam Sastra Dunia Ketiga*, (dalam Jurnal Susastra: Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya, Vol. 1, No. 1, 2008), 3.

berlapis. Penjajah tak mesti orang kulit putih dan yang terjajah bisa terjadi orang kulit putih, Artinya yang terjajah dapat menjadi penjajah.[27]

Konsep liminalitas (*liminal-space*) Bhabha mendeskripsikan "ruang antara" tempat perubahan budaya dapat berlangsung. Ruang tersebut adalah ruang antarbudaya tempat strategi-strategi kedirian personal (akumulasi dari struktur subjek) atau komunal dapat dikembangkan. Hal itu dapat dilihat pula sebagai suatu wilayah proses gerak dan pertukaran antara status yang berbeda-beda dan yang terus menerus. Semua ungkapan dan sistem budaya tersebut dibangun dalam sebuah ruang yang disebut "ruang enusiasi ketiga".[28] Ruang ambang atau ruang diantara inilah kaum terjajah menemukan strategi perlawanan terhadap kaum penjajah, bukan melawan dengan cara frontal melainkan justru dengan perselingkuhan budaya yaitu dengan mengambil alih tanda-tanda budaya penjajah tapi diberi isi dan digugat sehingga menghasilkan identitas dan cara hidup yang baru. Kemudian, ketegangan antara penjajah dan terjajah menghasilkan apa yang disebut dengan hibriditas (*hibridity*). Sehubungan dengan hibriditas, Bhabha kembali pada konsepsi psikologi Franz Fanon untuk mengemukakan bahwa keambangan (liminalitas) dan hibriditas adalah atribut-atribut yang diperlukan dalam kondisi kolonial.

Kesadaran Nasionalisme (dalam) Bayangan Kapitalisme dan Reformasi (Gereja)

Untuk melacak bilamana benih kesadaran nasional mulai terbentuk dalam realitas masyarakat, Anderson memulai kajiannya dengan menyusuri dinamika perkembangan kehidupan sosio-ekonomi-politis di daratan Eropa beberapa abad silam. Ia menemukan hal utama yang menarik, bahwa di sekitar peralihan abad ke-16, bisnis percetakan dan penerbitan buku di Eropa mulai mengalami lonjakan kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada periode tahun 1500- 1550-an. Sebagaimana yang dikutip dari Febvre dan Martin dalam *The Coming of the Book*, ladang bisnis dengan prospek menguntungkan seperti ini benar-benar digarap menjadi industri besar oleh para kapitalis kaya.

Dalam situasi semacam ini, menurut Anderson, revolusi bahasa yang terjadi sebagai bagian penting pada masa itu telah turut memberi dampak langsung terhadap tergugahnya rasa kesadaran nasional. Ada tiga faktor yang berpengaruh dalam hal ini: a). Perubahan karakter bahasa Latin. Bahasa Latin yang berkembang di masa itu bukanlah bahasa Latin

[27] Brown, Jessica. (2011). *The Hybridity Of History in Midnight's Children,* Sigma Tau Delta Review: A National Undergraduate Literary Journal, 5.
[28] Bhabha, Homi K. (2007). The Location Of Culture. New York: Routledge, 5.

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

Gerejawi sebagaimana yang umumnya dipakai pada abad-abad pertengahan. Bahasa Latin yang dikembangkan ini lebih tua, sehingga lebih bersifat *esoterik* atau hanya dapat dimengerti oleh sekumpulan orang saja; b). Dampak Reformasi Gereja oleh Luther dkk, turut terbantu oleh jasa kapitalisme cetak saat itu; dan c). Kelahiran bahasa-bahasa-ibu yang mendominasi sentra-sentra administratif di wilayah-wilayah monarki, pada umumnya berturut-turut saling menggantikan bahasa Latin dengan bahasa Prancis Norman; atau bahasa Anglo-Sakson yang digantikan denganbahasa Inggris Awal, dan seterusnya. Dalam kaitan itu, Anderson menulis:

> Cukup dimungkinkan mencerna kemunculan komunitas-komunitas nasional yang terbayang, tanpa salah satu faktor di atas, atau bahkan tanpa ketiga-tiganya. Yang sebetulnya dalam makna positif membuat komunitas-komunitas baru itu dapat dibayangkan, adalah interaksi setengah-kebetulan tetapi bersifat eksplosif, antara sistem produksi dan hubungan-hubungan produktif (kapitalisme), teknologi komunikasi (cetak-mencetak), serta fatalitas (kematian) keberagaman bahasa manusia.[29]

Bagi Anderson, kemunculan bahasa-bahasa cetak dalam jalinan erat dengan kapitalisme cetak, telah membentangkan landasan bagi kesadaran nasional, dalam tiga cara yang dapat dibedakan. Pertama, koalisi ini telah menciptakan ajang pertukaran dan komunikasi yang terunifikasi di bawah bahasa Latin, dan di atas bahasa-bahasa-ibu lisan. Dengan bahasa-bahasa cetak (perpaduan antara tinta dan kertas), sebagian orang Eropa bisa lebih memahami kata-kata orang lain yang menggunakan ragam bahasa lisan yang agak berbeda. Karena itu, sesama pembaca yang terhubung dengan orang lain melalui barang cetakan, lantas membentuk janin komunitas yang dibayangkan secara nasional tetapi tampak tidak kasat mata, bersifat sekular dan partikular. Kedua, kapitalisme cetak juga memberi kepastian baru kepada bahasa, yang untuk waktu jangka panjang dapat membantu membangun citra kepurbaan yang begitu penting bagi ide subjektif tentang bangsa. Karena itu, Febvre dan Martin juga menemukan bahwa pada abadke-17, bahasa-bahasa di Eropa pada umumnya telah memuat bentuk-bentuk modernnya.[30] Ketiga, kapitalisme cetak pun telah menciptakan bahasa kekuasaan yang jenisnya berlainandengan bahasa-bahasa ibu yang dipakai dalam urusan-urusan administrasi sebelumnya.

Terhadap eksistensi bahasa dan perkembangannya sebagaimana diuraikan di atas, Anderson berkesimpulan bahwa adanya saling tindih - menindih antara kapitalisme cetak

[29] Benedict Anderson, *Komunitas-Komunitas Terbayang*. . ., 64
[30] Ibid., 115-118

dan teknologi percetakan dengan fatalitas keragaman bahasa manusia, sebetulnya telah menciptakan kemungkinan bagi kelahiran bentuk baru komunitas terbayang, yang morfologi dasarnya sesungguhnya telah menciptakan panggung bagi kiprah bangsa modern.

Nasionalisme Resmi

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa berdasarkan tujuan yang murni bersifat administratif, sejumlah dinasti penguasa monarki-monarki di Eropa secara hampir bersamaan telah memantapkan bahasa-bahasa-ibu tertentu sebagai bahasa resmi negaranya dengan pilihan bahwa bahasa-bahasa tertentu itu hanyalah warisan yang tak disadari sebelumnya, atau karena pertimbangan kenyamanan dalam penggunaannya.[31] Akan tetapi, ledakan revolusioner bahasa-bahasa di Eropa secara bertahap telah menciptakan dan menyebarkan keyakinan, bahwa bahasa-bahasa yang ada boleh dibilang merupakan "milik pribadi" dari kelompok-kelompok khas, yakni mereka yang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, serta para pembaca tulisan-tulisan dalam bahasa-bahasa itu. Menurut Anderson, dalam situasi semacam ini kelompok-kelompok tadi seolah-olah telah membayangkan dirinya sebagai komunitas-komunitas, sehingga menganggap dirinya "berhak" memperoleh tempat otonom masing-masing dalam kancah persaudaraan antar manusia yang setara. Hal semacam ini secara tidak langsung oleh para penguasa dinastik, dianggap sebagai dilema yang makin lama kian mengancam eksistensi kedinastian mereka.[32]

Dalam perkembangannya, di sepanjang abad ke-19 hampir sejumlah besar penguasa dinasti telah menggunakan semacam bahasa-bahasa-ibu sebagai bahasa resmi negara mereka.[33] Di sisi yang berbeda, gagasan-gagasan nasionalis di seluruh kawasan Eropa pun mengalami lonjakan kemajuan yang begitu pesat. Hal ini lantas memunculkan kecenderungan yang semakin lama semakin tampak kelihatan, bahwa kalangan monarki-monarki tadi, sementara bergegas untuk menyatakan pengakuan akan jati diri nasionalnya masing-masing. Misalnya, wangsa Romanov yang kemudian mengakui diri mereka sebagai bangsa Rusia Raya, wangsa Hanover sebagai bangsa Inggris, bangsa Hohenzollern dengan jati diri sebagai bangsa Jerman, dan seterusnya. Meminjam istilah dari Seton-Watson, Anderson sepakat menyebut proses "naturalisasi" dinasti-dinasti penguasa Eropa

[31] Ibid., 117
[32] Ibid.
[33] Ibid., 128

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

ini sebagai "nasionalisme-nasionalisme resmi."[34]

Lebih lanjut menurut Anderson, nasionalisme-nasionalisme resmi ini paling baik jika dipahami sebagai cara memadukan naturalisasi dengan penyimpanan sebagian kekuasaan dinastik lama. Utamanya sejauh cakupan wilayahnya yang majemuk, yang sejak Abad Pertengahan telah menjadi bagian dari dinastik tersebut. Anderson menyederhanakan ini sebagai bentuk, merger dengan niat menyatukan bangsa dengan kerajaan dinastik. Karena itu, kunci pemahaman dan penempatan "nasionalisme resmi" menurut Anderson, ialah dengan mengingat bahwa nasionalisme resmi itu berkembang "setelah" dan sebagai "reaksi terhadap" gerakan- gerakan nasional kerakyatan yang marak di Eropa sejak dasawarsa 1820-an.[35]

Gelombang Akhir Nasionalisme

Bagi Anderson, Perang Dunia kedua yang terjadi di paruhan pertama abad ke-20 benar- benar telah mengakhiri zaman dinasti-dinasti. Sampai tahun 1922, tercatat bangsa-bangsa unggul seperti Habsburg, Hohenzollern, Romanov, dan Ottoman, hanya tinggal kenangan. Periode itu lalu menjadi era kebangkitan, tak terkecuali bagi negeri-negeri merdeka non-Eropa, dimana negara *kebangsaan* kemudian menjadi norma internasional yang absah.[36] Dalam konteks ini, Anderson meyakini bahwa perkembangan nasionalisme di daerah- daerah koloni dan imperial di luar kawasan Eropa, sangat erat berkaitan dengan transformasi sosio-politis, khususnya di bidang pendidikan yang dialami masyarakat pribumi di daerah-daerah tersebut. Menurut apa yang dicatat Anderson, di akhir abad ke-19 dan terutama di dekade-dekadeawal abad ke-20, orang-orang pribumi di daerah-daerah koloni mengadakan "peziarahan" ke pusat-pusat metropolis bangsa penjajah, dan kian hari kian meningkat jumlahnya.[37]

Ada tiga faktor yang disinyalir mempengaruhi hal ini, yakni: a). *pertama*, kenaikan pesat mobilitas fisik yang dimungkinkan oleh kemajuan mencenangkan yang dihasilkan kapitalisme industrial, misalnya dengan kemunculan kereta api dan kapal uap yang telah lalu-lalang sejak abad ke-19, dan kehadiran mobil dan pesawat terbang yang diciptakan di abad ke-20. Semua produk kemajuan di bidang transportasi ini membuat jarak, waktu, dan

[34] Seton-Watson, *Nation and States*. . ., 148
[35] Benedict Anderson, *Komunitas-Komunitas Terbayang*, 168
[36] Ibid., 171
[37] Ibid., 184-185

kemampuan menempuh perjalanan menjadi lebih efektif dan efisien; b). *kedua*, kolonisasi dan imperialisasi juga memiliki sisi praktis selain sisi ideologisnya. Hal ini tampak dari kebutuhan yang tinggi akan jumlah pekerja di pusat-pusat administrasi daerah-daerah koloni; c). *ketiga*, penyebaran pendidikan gaya modern khususnya di daerah koloni, yang bukan saja diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, tapi juga oleh berbagai lembaga keagamaan dan swasta.[38]

Kenyataan semacam inilah yang di kemudian hari akan menempatkan kaum-kaum terpelajar pribumi sebagai pemain-pemain inti dalam kebangkitan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahan. Mereka-mereka ini pula yang akan berperan sebagai "perintis garis depan" dengan kapasitas membaca dan penguasaan dwibahasa, yang tentunya akan membedakan mereka dari sesama pribumi lainnya. Bagi Anderson, kemampuan berbahasa ini (terutama pada bahasa negara Eropa) berarti secara umum telah membuka akses bagi kaum pribumi terpelajar untuk mengenal dan mempelajari kebudayaan Barat modern, dan secara khusus telah mengantarkan mereka untuk berkenalan dengan model-model nasionalisme, kebangsaan, dan negara-kebangsaan orang Barat. Terhadap hal ini, Anderson menulis:

> Sebab, paradoks nasionalisme resmi imperial adalah, bahwa apa yang makin lama makin digagas dan ditulis sebagai "sejarah nasional" pada akhirnya akan dibawa masuk ke dalam kesadaran orang-orang yang dijajahnya sendiri – bukan saja lewat perayaan-perayaan yang sesekali diadakan, tetapi juga melalui ruang-ruang baca serta kelas-kelas di sekolah tanah-tanah jajahan. Ironisnya, tentu semua sejarah ini ditulis dari suatu kesadaran historiografis yang, pada peralihan abad, di seluruh wilayah Eropa, menjadi terumuskan secara nasional. [39]

Lebih jauh, Anderson melihat bahwa ada tampilan karakteristik tertentu dalam kebangkitan kaum terpelajar nasionalis di tanah-tanah jajahan pada abad ke-20. Sebab, sampai pada taraf tertentu mereka dipandang memiliki watak yang berbeda dibanding para intelektual nasionalis. Di Eropa pada abad ke-19. Para nasionalis pribumi ini nyaris tidak menyimpang, umumnya masih berusia sangat muda, dan cenderung melekatkan makna penting politis tertentu yang rumit terhadap kemudaan mereka. Anderson juga menyadari bahwa baik di Eropa maupun di daerah-daerah jajahan, "pemuda" adalah gambaran dari kedinamisan, kemajuan, idealisme yang berselimut kesediaan berkorban jiwa-raga, yang turut dilengkapi dengan hasrat revolusioner – sekalipun menurutnya, ada pula perbedaan

[38] Ibid., 174-175
[39] Ibi., 181

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

yang signifikan.

Di Eropa, berbagai bahasa nasionalisme yang ada merupakan bahasa-ibu yang telah digunakan sejak usia dini, atau merupakan bahasa metropolitan yang telah berakar dalam populasi masyarakat hingga di berbagai pelosok selama ratusan tahun. Karena itu, tidak ada kaitan yang pasti antara bahasa, umur, kelas, dan status dalam nasionalisme Eropa. Sementara dalam konteks tanah jajahan, para pemuda adalah generasi pertama yang umumnya telah memperoleh pendidikan gaya Eropa, dan karenanya akan berbeda dengan orang tua mereka, secara linguistis maupun budaya.[40]

Nasionalisme dari Hindia-Belanda (Indonesia)

Dalam pengamatan Anderson, kemunculan nasionalisme di daerah kolonial Hindia Belanda (Indonesia) merupakan gambaran yang rumit tetapi mempesona. Hal ini lebih-lebih karena ukuran kawasan ini yang relatif cukup luas karena bentangan geografisnya mencakup ribuan pulau dengan penduduk yang sangat banyak, dan spesies keagamaan yang beragam, serta kepelbagaian etno-linguistiknya. Nasionalisme di kawasan ini menurut Anderson, adalah bagian dari gelombang terakhir nasionalisme yang pada masa itu sementara melanda kawasan Asia dan Afrika.

Ada pula hal-hal lainnya yang menarik dalam catatan Anderson. Misalnya, tentang keberadaan penduduk pesisir timur pulau Sumatera dalam hubungannya dengan penduduk sebelah barat Semenanjung Malaka. Mereka bukan saja "dekat" karena hanya terpisah oleh Selat Malaka, tetapi juga karena keterkaitan identitas kesukuan mereka. Umumnya mereka saling dapat memahami ucapan masing-masing, bahkan hingga memiliki kesamaan agama secara umum, dan mungkin juga beberapa kesamaan lain secara kultural.

Akan tetapi, bila orang-orang Sumatera ini diperhadapkan dengan orang-orang Ambon yang hidup ribuan mil jauhnya di sebelah timur, tentunya tidak ada kesamaan kesukuan di antara mereka, bahkan juga agama yang relatif berbeda. Namun menurut Anderson, justru dalam abad ke-20 orang-orang Sumatera mulai memahami bahwa orang-orang Ambon adalah sesamanya "orang Indonesia." Dengan demikian, mereka justru harus menganggap orang-orang Melayu di seberang Selat Malaka tadi sebagai "orang asing." Dasar pikir terhadap kenyataan ini tampak meyakinkan ketika Anderson menulis, bahwa:

Tiada yang lebih berperan dalam memupuk rasa keterikatan ini selain sekolah-

[40] Ibid., 183

> sekolah yang didirikan oleh rezim penjajah di Batavia, yang kian banyak jumlahnya sesudah pergantian abad... Jadi, sistem persekolahan kolonial abad ke-20 melahirkan "peziarahan-peziarahan"yang sejajar dengan perjalanan-perjalanan para fungsionaris yang telah lebih dahulu mapan.[41]

Terhadap realitas adanya orang-orang pribumi terpelajar Indonesia yang terdidik dalam sistem pendidikan kolonial Belanda ini, Anderson pun berkesimpulan bahwa:

> Dengan kata lain, pengalaman bersama yang mereka peroleh, serta perkawanan yang diwarnai oleh persaingan yang ramah di ruang-ruang kelas, memberi pada peta-peta koloni yang mereka pelajari, sebuah realitas imajiner yang bentang Akhirnya, bagai larva yang telah matang, *inlander* mendadak berubah wujudmenjadi rama-rama spektakuler yang dinamakan "orang Indonesia".

Anderson juga mencatat bahwa di zaman dahulu, saling perang antar etnis juga pernah berlangsung di Nusantara. Bahkan pengalaman semacam ini sempat dieksploitasi oleh pihak kolonialis Belanda, bahkan setelah Republik Indonesia diproklamasi (1945) dandiakui kedaulatannya (1949). Namun, bagi Anderson, kendati riak-riak pemberontakan etnis jugasempat kembali melanda hampir seluruh wilayah Republik Indonesia antara tahun 1950-1964, nyatanya toh "Indonesia" tetap bertahan. Hal ini sebagian dimungkinkan karena "Batavia" tetap menjadi puncak piramida pendidikan hingga kini, dan juga karena kebijakan pemerintah kolonialBelanda sebelumnya yang tidak mengirimkan kaum-kaum terpelajar pribumi kembali ke daerah asalnya masing-masing. Karena itu, Anderson berkesimpulan bahwa:

> Bisa dikatakan semua kelompok etnolinguistik besar, pada akhir zaman penjajahan, sudah terbiasa menggagas adanya sebentuk panggung kepulauan, yang tergelar untuk mereka, di mana masing-masing punya peran untuk dimainkan.

Dalam hubungan dengan hal ini, maka Anderson juga ingin mengingatkan soal kelahiran nasionalisme di Indonesia, yang mana tidak dapat dipisahkan dari kelahiran "bahasa Indonesia." Untuk itu, Anderson mencatat bahwa: " . . . sejak dasawarsa 1920-an,

[41] Zakaria J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme. Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 43ff. Dari perspektif sejarah, Ngelow melihat bahwa kebangkitan nasionalisme di Indonesia sangat berkaitan dengan dua faktor yang paling mendasar. Pertama, pengaruh perkembangan situasi internasional yang ditandai dengan kebangkitan bangsa-bangsa terjajah – khususnya di Asia – untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Salah satu peristiwa penting yang menunjang perkembangan ini adalah kemenangan Jepang (Asia) atas Rusia (Eropa) dalam perang tahun 1905. Kedua, penerapan "politik etis" sebagai kebijakan baru dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam hubungan dengan kebijakan yang baru ini, maka ada dua kepentingan yang terkandung di dalamnya, yakni: pembentukan Volksraad dan peningkatan pendidikan kaum pribumi. Karena itu, dengan meningkatkan jumlah dan jejang pendidikan bagi kaum pribumi, maka pada gilirannya akan melahirkan kaum terpelajar Indonesia. Mereka inilah – yang dalam istilah Ngelow – disebut sebagai "penggagas" dan "tulang punggung" pergerakan nasional.

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

„bahasa Indonesia" telah mengada dengan penuh kesadaran diri."[42] Sebetulnya, bahasa Belanda sendiri sejak awal penaklukan Hindia-Belanda di awal abad ke-17, tidak benar-benar diajarkan kepada penduduk pribumi, dan hal itu baru secara serius dilakukan pada abad ke-20. Karena itu, yang berkembang di masa penjajahan justru sebuah bahasa-negara yang tumbuh di atas landasan bahasa-niaga antarpulau *(inter-insular lingua franca)*, yakni: *dienstmaleisch* (bahasa Melayu-pegawai atau bahasa Melayu-administratif).

Pada awal abad ke-19, bahasa ini telah mapan digunakan dalam tata kepegawaian negara.Pasca perkembangan kapitalisme cetak di pertengahan abad ini, maka bahasa itu pun merambah setiap ruang-ruang pasar dan media. Mula-mula seringkali dipakai oleh para wartawan dan pelaku percetakan, seperti orang Tionghoa serta Indo. Namun, menjelang akhir abad ke-19 sudah digunakan oleh penduduk pribumi. Akhirnya, setelah diasah dan dipoles selama dua generasi oleh para penulis serta pembaca perkotaan, maka pada 28 Oktober 1928, bahasa itu pun sudah siap diadopsi oleh "Indonesia Muda" sebagai "bahasa Indonesia", yang adalah bahasa nasional.[43]

Selanjutnya, dengan menyimak kenyataan yang tampak lewat kelahiran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, maka Anderson juga menjelaskan lebih lanjut, bahwa sifat bahasa apapun, yang terpenting adalah kemampuannya untuk membuahkan komunitas-komunitas terbayang, terlebih lagi dalam membangun solidaritas partikular. Akan tetapi, yang menciptakan nasionalisme adalah bahasa cetak, bukannya bahasa-ibu/daerah/particular *per se*. Karena ituAnderson berkesimpulan, bahwa "di atas segala-galanya, gagasan tentang bangsa itu sendiri kini bersarang dengan mantapnya di hampir semua bahasa-cetak kebangsaan itu sendiri bisa dibilang tak terpisahkan dari kesadaran politis."[44]

Kebangsaan dan Agama dalam Imajinasi Nasionalisme

Risalah teoritik di atas telah memunculkan sebuah kesadaran dan imajinasi lahirnya nasionalisme mulai dari bangsa-bangsa Eropa hingga bangsa-bangsa yang terjajah, termasuk bangsa Indonesia. Imajinasi nasionalisme menegaskan sebuah kehendak bersama dari seluruh masyarakat untuk termerdekakan dari belenggu kolonialisme. Kehendak bersama untuk merdeka merupakan imajinasi yang mendorong sebuah perjuang bersama

[42] Benedict Anderson, *Komunitas-Komunitas Terbayang*, 200
[43] Ibid., 202
[44] Ibid., 203

seluruh masyarakat. Perjuangan bersama direkatkan dengan penyatuan berbagai simbol-simbol kebudayaan, termasuk bahasa, yang mempersatukan spirit nasionalisme. Tidak terlewatkan, dalam sejarah nasionalisme Indonesia, kehadiran agama-agama memainkan peranan penting lahirnya sebuah perjuangan kemerdekaan dan nasionalisme Indonesia. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa "atas berkat rahmat Tuhan yang Mahakuasa.... dan ditegaskan pula di dalam sila pertama Pancasila mengenai Ketuhanan yang maha Esa.

John Titaley memaknai sejarah kemerdekaan Indonesia itu, antara lain berdasarkan alinea ketiga pembukaan UUD 1945 dan Sila Pertama Pancasila, sebagai suatu bahasa bersama dan pengakuan bersama seluruh umat beragama di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah ekspresi religiousitas keindonesiaan.[45] Bahasa dan pengakuan bersama itu merupakan suatu teks sakral yang direkognisi di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Semua masyarakat Indonesia yang beragama mempunyai imajinasi dan cita-cita yang sama di dalam perjuangan kemerdekaan dan tegaknya nasionalisme Indonesia. Dalam perspektif teologis yang lebih mendalam, John Ruhulessin dan Parihala, menyebutkan bahwa nasionalisme Indonesia merupakan hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia, yang dikehendaki oleh Allah, sebab cita-cita kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu kolonialisme, adalah berkenan dengan kehendak Allah untuk menyelamatkan seluruh ciptaan-Nya. Nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah *sacrementum Dei.*[46] Dengan demikian, imajinasi nasionalisme dalam perspektif kebangsaan dan agama, merupakan sebuah pijakan perjuangan untuk keadilan, kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemanusiaan yang sejati.

KESIMPULAN

Imajinasi nasionalisme menegaskan bahwa tujuan dari kemerderkaan Indonesia adalah untuk terlepas dari penjajahan. Namun secara faktual, negara Indonesia yang adalah negara pasca kolonial masih melanggengkan praktek dan mentalitas kolonial. Karena kolonial bukan saja berkaitan dengan subjek yang mengidentifikasi diri sebagai yang terjajah dan penjajah, melainkan mentalitas yang dapat berkembang biak dari pihak yang terjajah untuk menjajah kaum sendiri. Sebab itu mentalitas ini, dapat berkembang biak

[45] John A. Titaley, *Religiositas Di Alenia Ketiga* (Salatiga: Satyawacana University Press, 2013).
[46] Johny C. Ruhulessin and Yohanes Parihala, "Being an Indonesian Christian: Exploration of a Theology of Nationalism in the History of the Proclamation of Indonesian Independence on 17 August 1945," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* (2021).

Doi: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v6i1.1258

sendiri tanpa keharusan terhubung dengan sumber wacananya, Itu sebabnya ketika negara Indonesia telah Merdeka, masih mewabahnya mentalitas penjajah di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Kesimpulan ini merupakan sebuah diskursus panjang dari hasil riset penulis, dan sekaligus membuka ruang percakapan lebih jauh pada maka relevansi nasionalisme di tengah konteks ketidakadilan, diskriminasi, pemiskinan masyarakat-masyarakat termarginal. Gagasan-gagasan teoritik mengenai imajinasi nasionalisme menjadi sebuah imperatif membangkitkan suatu kesadaran bersama untuk melawan segala bentuk kolonialisme baru yang menjajah sebuah negara merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson Benedict. *Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso. 1991.

Besecke Kelly, "Not Just Individualism: Studying American Culture and Religion after Habits of the Heart", in *Sociology of Religion,* Vol. 68, No. 2 (2007).

Castells Manuel, *The Power of Identity.* Blackwell Publishing, 2002

Gray Paul S, John B. Williamson, and David A. Karph, *The Research Imagination: An Introduction to Qualitative and Quantitative Methods*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Homi K. Bhabha, *The Location of Culture* New York: Routledge, 2007.

Jacobson John A, *An Introduction to Political Science*. London: Wadsworth Publishing Company, 1998.

Jessica Brown, *"*The Hybridity Of History in Midnight's Children," *in A National Undergraduate Literary Journal*, 5 (2011).

Kahin, George. Mc.T. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1952.

Kandito Argawi, *Soekarno. The Leadership Secret of.* Depok: Oncor Semesta Ilmu, 2011.

Likumahwa George Marthen, "Imajinasi Nasionalisme dari Masyarakat Maneo di Kaki Gunung Murkele, Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah." Disertasi. Ambon: Pascasarjana UKIM, 2024.

Likumahwa, George Marthen, John A Titaley, and Steve Gaspersz. "KELUAR DARI KEMISKINAN: STUDI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN JEMAAT DI DUSUN SIAHARI, KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 2, no. 1 (2020).

Laclau E, *New Reflections on the Revolution of Our Time*. London: Verso, 1990.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mills. C. W, *The Sociological Imagination.* Oxford University Press, 2000.

Ngelow Zakaria J, Kekristenan dan Nasionalisme. Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.

Nuri Suseno, *Kewarganegaraan*: *Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer*. Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2010.

Paskarina, C, "Wacana Negara Maritim dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia," dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1. No. 1 (2016).

Philpott, Simon. 2003. *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Terj. Nuruddin Mhd. Ali, Uzair Fauzan. Yogyakarta: LkiS, 2003.

Pilliang, Y. A. "Jika Rakyat Kritis, Ia Sudah Na-sionalis," dalam *Gerbang,* Vol. 11. IV (2005), 8.

Ruhulessin, Johny C., and Yohanes Parihala. "Being an Indonesian Christian: Exploration of a Theology of Nationalism in the History of the Proclamation of Indonesian Independence on 17 August 1945." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* (2021).

Sarjono Agus R, "Pendidikan dan Modernitas Barat Dalam Sastra Dunia Ketiga," dalam *Jurnal Susastra: Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, (2008).

Seton-Watson Hugh, *Nation, and State. An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism.* Boulder, Colorado: Westview Press, 1977.

Taylor Charles, *Dilemma and Connections: Selected Essays*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.

Titaley, John A. *Religiositas Di Alenia Ketiga*. Salatiga: Satyawacana University Press, 2013.